

PENGUATAN *ECOLOGICAL CITIZENSHIP* MELALUI PELAKSANAAN PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH)

Ikrimah Saputra
¹PPKn Pascasarjana UNS, Surakarta
Ikrimahsaputra96@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam upaya penguatan *ecological citizenship*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik studi dokumen yakni buku pedoman pelaksanaan program KOTAKU dan juga dokumen tentang pelaksanaan program KOTAKU di berbagai daerah. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa program KOTAKU mampu menjadi penggerak partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Hal ini dikarenakan berbagai materi, kegiatan, dan strategi operasional dalam program KOTAKU mendukung dan sejalan dengan tahapan-tahapan dalam penguatan *ecological citizenship* yakni *environmental knowledge*, *environmental skill*, *environmental attitudes*, dan *environmental participation*. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menyarankan agar pelaksanaan program KOTAKU dan program sejenis tidak menggunakan pendekatan *top-down*, melainkan menggunakan pendekatan kolaboratif yang akan menumbuhkan sinergi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah sehingga memungkinkan masyarakat memberikan aspirasi serta melakukan analisis terhadap program yang sedang dilakukan.

Kata kunci : *Program KOTAKU, partisipasi masyarakat, ecological citizenship*

PENDAHULUAN

Upaya pelestarian lingkungan saat ini merupakan hal yang sangat urgen bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara yang memiliki kepadatan penduduk yang menempati posisi sepuluh besar dunia, Indonesia sangat rentan terhadap berbagai permasalahan lingkungan yang ditimbulkan akibat ulah manusia. Salah satu permasalahan lingkungan yang mencolok adalah semakin meluasnya lingkungan kumuh, terutama di kota-kota besar. Menurut data yang di himpun oleh Kompas.com, luas kawasan kumuh di Indonesia mencapai 38.431 hektar. Rinciannya 23.473 hektar berada di wilayah perkotaan dan 11.957 hektar di perdesaan. Lingkungan yang kumuh dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit kulit, diare, tipes, demam berdarah. Kawasan kumuh, terutama yang berada di sekitar bantaran sungai juga menjadi salah satu penyebab banjir yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Jika hal ini terus berlanjut akan

mengganggu stabilitas nasional. Maraknya muncul kawasan kumuh selain karena faktor kurang maksimalnya penataan dan penertiban tata kota, juga disebabkan oleh faktor ekonomi dan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam konsep demokrasi modern Schmitter & Karl (1991: 76) menjelaskan bahwa *"modern political democracy just not about sharing and separating power, but there are also consist a mechanism about civic engagement which make citizen have more participated in state administration and controlling government"*. Jadi demokrasi bukan hanya sekedar masalah kekuasaan, melainkan juga mengenai mekanisme keterlibatan warga negara dalam penyelenggaraan negara dan pengawasan pemerintahan. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan atau wadah yang dapat meningkatkan partisipasi warga negara dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk di dalamnya adalah upaya pelestarian lingkungan.

Hal ini diperkuat oleh pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa "Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Jadi, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat mempunyai kewajiban yang sama untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah salah satu program pemerintah yang dapat menjadi wadah dan penggerak partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan selama tiga hari yakni pada tanggal 27 s/d 30 November 2018, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini peneliti berusaha menggambarkan hasil penelitian dalam bentuk uraian

mengenai pengaruh program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dalam penguatan *ecological citizenship*. Objek yang diteliti adalah buku pedoman pelaksanaan program KOTAKU dan pelaksanaan program KOTAKU di berbagai daerah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik studi dokumen. Teknik analisis data yaitu dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ecological Citizenship

Dobson (2004: 18) mengatakan bahwa “*The first virtue of ecological citizenship is justice...a just distribution of ecological space*”. Jadi Nilai utama kewarganegaraan ekologis adalah keadilan, Pemanfaatan sumber daya alam disertai pelestarian sumber daya alam, Pemanfaatan lingkungan menjadi tempat tinggal disertai dengan perawatan lingkungan. Lebih lanjut Curtin dalam Rusnaini (2016: 367), menjelaskan bahwa “gagasan kewarganegaraan ekologis yang terkait dengan lingkungan dapat membentuk keseimbangan kepribadian masing-masing individu dan publik”.

Kewarganegaraan ekologis membahas bagaimana manusia sebagai individu yang memiliki identitas diri (terutama: identitas dan moralitas) yang dapat beradaptasi dengan lingkungan di masyarakat, baik kapasitas internal (aktivitas) untuk menerima otoritas komunitas atau secara eksternal untuk membentuk dan menjadi terlibat dalam membentuk komunitas konstitutif (Rusnaini, 2016:367).

Dalam konteks kewarganegaraan ekologis, jika kita mengambil etika lingkungan sebagai lensanya, kita akan dapat meningkatkan tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Ide kewarganegaraan ekologis juga dapat mendorong gagasan umum komunitas moral yang lebih dari sekadar komunitas manusia. Menjadi warga negara yang sadar lingkungan berarti kita memerlukan transformasi identitas-moral untuk penerimaan alami di masyarakat. Kewarganegaraan ekologis telah menjadi topik yang didiskusikan secara global karena kerusakan lingkungan yang tak dapat diatasi dan panggilan untuk perlindungan lingkungan. Jika kita menghubungkannya dengan keberadaan kita di dunia saat ini sebagai *risk society* (masyarakat berisiko), upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak degradasi lingkungan menjadi semakin signifikan. Kami dipanggil untuk peduli lingkungan, mencegah dari eksploitasi lingkungan, dan mempromosikan akuntabilitas untuk sumber daya alam.

World Wide Fund and Nature (WWF) Malaysia menjelaskan bahwa *ecological citizenship* mempunyai empat tahapan utama:

1. *Environmental Knowledge*

Environmental Knowledge adalah proses pemberian pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan pengetahuan mengenai lingkungan.

2. *Environmental Skill*

Environmental Skill adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, mencegah dan mengatasi problem lingkungan, baik secara individu, kelompok, atau organisasi.

3. *Environmental Attitudes*

Environmental Attitudes atau etika lingkungan merupakan seperangkat nilai dan *feelings* terhadap lingkungan, serta motivasi untuk berperan aktif bagi pengembangan ekologi dan proteksinya, baik secara individu, kelompok, atau organisasi

4. *Environmental Participation*

Environmental Participation adalah sensitifitas warga negara terhadap persoalan ekologi dan berupaya menerapkan kepedulian lingkungan melalui serangkaian tindakan pro lingkungan.

(WWF-Malaysia: 2008)

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

Program KOTAKU adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 Propinsi yang menjadi "platform" atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat.

Program ini dilakukan dengan prinsip kolaborasi yakni melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui pembangunan partisipatif dengan memadukan perencanaan dari atas (*top-down*) dan dari bawah (*bottom-up*) sehingga memungkinkan masyarakat memberikan aspirasi serta melakukan analisis terhadap program yang sedang dilakukan.

Ketentuan penyelenggaraan program KOTAKU meliputi:

1. Lembaga Penanganan Kumuh.

Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja-PKP) atau lembaga sejenisnya yang dimandatkan untuk merumuskan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di tingkat Kabupaten/Kota.

2. Berorientasi "*OUTCOME*"

Setiap Kabupaten/Kota menetapkan tujuan dan tujuan antara yang diukur dengan indikator "*outcome*" yang akan berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional dalam RPJMN (capaian pemda berkontribusi pada capaian 0% kumuh Nasional)

3. Pemanfaatkan hasil pendataan kumuh.

Masing-masing Kabupaten/Kota mengkonsolidasikan data kumuh dari berbagai sumber data termasuk didalamnya hasil pendataan kumuh serta data permukiman lainnya yang sudah ditetapkan pemerintah daerah dalam SK Kumuh, Perda Kumuh, dll. Hasil konsolidasi data digunakan sebagai kondisi awal dalam merumuskan target capaian.

4. *Review* atau Penyusunan rp2kp-kp.

Perencanaan di tingkat Kabupaten/Kota (rp2kp-kp) dikoordinasikan oleh Pokja PKP dan di tingkat desa/kelurahan (rplp/rtplp) dikoordinasikan oleh TIPP. Bagi Kabupaten/Kota yang sudah memiliki dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh Tingkat Kabupaten/Kota, seperti misalnya dokumen rkpkp, dokumen SIAP, maka perencanaan mencakup proses review untuk memastikan jika rencana yang sudah disusun memenuhi substansi yang dibutuhkan untuk penanganan seluruh kawasan kumuh di kota yang bersangkutan untuk jangka waktu lima tahun. Untuk Kabupaten/Kota yang belum memiliki dokumen rp2kp-kp maka perencanaan mencakup penyusunan dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan (rp2kp-kp). Selain itu penyusunan rp2kp-kp, perencanaan juga mencakup penyusunan desain kawasan dan DED kegiatan infrastruktur yang akan dilaksanakan.

5. Pelaksanaan kegiatan.

Semua kegiatan harus berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan di dokumen perencanaan di tingkat Kabupaten/Kota maupun kelurahan/desa dan dilakukan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Kegiatan dipilah menjadi kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan kegiatan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh pihak ketiga. Bila melibatkan pihak ketiga seperti kontraktor maka pelaksanaan dilakukan melalui pola *e-procurement* agar transparan.

6. *Monev* partisipatif.

Guna memastikan bahwa pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh diperkotaan berjalan sesuai dengan tujuan dan rumusan kerangka keberhasilan maka penting dilakukan monitoring dan evaluasi dipimpin pokja dengan melibatkan berbagai unsur pelaku lainnya.

7. Selaras dengan sistem perencanaan Kabupaten/Kota.

Perencanaan di tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat desa/kelurahan harus terintegrasi dan selaras dengan sistem perencanaan Kabupaten/Kota; Dalam hal ini terintegrasi dengan misi RPJMD, RTRW Kabupaten/Kota, atau dokumen lainnya yang relevan.

8. Keterpaduan Pendanaan. Pendanaan dari berbagai sumber, yaitu APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, masyarakat, swasta dan pihak donor. Gambaran umum keterkaitan tahapan pelaksanaan penyelenggaraan

Adapun strategi operasional program KOTAKU meliputi:

1. Sosialisasi dan Edukasi Program KOTAKU

Yakni pengenalan visi, misi, dan tujuan program KOTAKU dan juga pemaparan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup

2. Pelatihan pengembangan kapasitas masyarakat dalam Program KOTAKU.

Yakni upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam melakukan pelestarian lingkungan meliputi kegiatan daur ulang sampah, pemanfaatan limbah, dan pembuangan sanitasi.

3. Pelatihan Badan Keswadayaan Masyarakat.

Yakni pelatihan masyarakat agar dapat mendayagunakan secara maksimal limbah ataupun sampah yang ada dilingkungan mereka sehingga lingkungan kumuh berkurang dan masyarakat mendapat nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan limbah lingkungan, sehingga bisa menjadi masyarakat swadaya yang mandiri.

4. Pendampingan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Program KOTAKU

Pendampingan ini bertujuan memastikan bahwa infrastruktur program KOTAKU sudah sesuai ketentuan yang ada dalam buku pedoman pelaksanaan program KOTAKU, dan juga memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat terkait penggunaan dan pengoperasian infrastruktur tersebut.

Penguatan *Ecological Citizenship* Melalui Pelaksanaan Program KOTAKU

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat diperoleh hasil bahwa program KOTAKU mampu menjadi wadah dan penggerak partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Hal ini dikarenakan berbagai materi, kegiatan, dan strategi dalam program KOTAKU yang mendukung dan sejalan dengan tahapan-tahapan dalam upaya mencapai *ecological citizenship* yakni *environmental knowledge, environmental skill, environmental attitudes, dan environmental participation*.

1. Pengaruh Program KOTAKU dalam tahap *environmental knowledge*

Pengetahuan lingkungan atau *environmental knowledge* yaitu ekspresi dari pengalaman dan pengetahuan yang berhubungan dengan interaksi alam serta pemahaman yang dibutuhkan untuk menciptakan dan melakukan perbaikan bagi kelestarian lingkungan, baik secara individu, kelompok atau organisasi (WWF-Malaysia, 2008). Dalam program KOTAKU terdapat berbagai materi yang disampaikan terkait dengan lingkungan hidup, seperti pentingnya upaya pelestarian lingkungan, tata cara pembuatan lubang biopori, tata cara pengelolaan limbah, tata cara pengelolaan sampah sehingga akan tercapai kemelekan ekologi pada masyarakat

2. Pengaruh Program KOTAKU dalam tahap *environmental skill*

Environmental skill adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, mencegah, dan mengatasi problem lingkungan, baik secara individu, kelompok, atau organisasi (WWF-Malaysia, 2008). Dalam program KOTAKU terdapat berbagai pelatihan dan praktik seperti pengelolaan sampah, pengelolaan limbah dapur, pembuatan lubang biopori sehingga masyarakat akan memiliki kapasitas yang baik dalam mengelola lingkungan.

3. Pengaruh Program KOTAKU dalam tahap *environmental attitudes*

Etika lingkungan (*environmental attitudes*) merupakan seperangkat nilai dan *feelings* terhadap lingkungan, serta motivasi untuk berperan aktif bagi pengembangan ekologi dan proteksinya, baik secara individu, kelompok atau organisasi (WWF-Malaysia, 2008). Setelah berjalannya program KOTAKU mulai tampak perilaku-perilaku pro lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, membersihkan sungai, buang air di jamban atau kamar mandi bukan di sungai.

4. Pengaruh Program KOTAKU dalam tahap *environmental participation*

Yaitu motivasi dan berbagai tindakan aplikatif (*actions*) di berbagai tingkatan kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, baik secara individu, kelompok, atau organisasi (WWF-Malaysia, 2008). Hal ini menjadi upaya penting

bagi pengembangan peran aktif warga negara baik secara individu, kelompok dan organisasinya untuk melakukan tindakan proteksi kepada lingkungan. Tindakan pertama yang dapat diperoleh dari etika lingkungan ini adalah keenganan untuk melakukan tindakan perusakan dan pengotoran lingkungan. Tindakan ini bisa berupa perilaku membuang sampah di tempatnya, melakukan penghijauan dari lingkungan terkecil yaitu rumah, perawatan lubang biopori dan sumur resapan sebagai penjagaan cadangan air, dan pengurangan serta pemanfaatan barang daur ulang seperti plastik.

Adapun berbagai materi, kegiatan, dan strategi operasional Program KOTAKU yang mendukung dan sejalan dengan tahapan-tahapan penguatan *ecological citizenship* dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Pengaruh Program KOTAKU terhadap penguatan *ecological citizenship*

No	Tahapan	Program KOTAKU
1	<i>Environmental Knowledge</i>	Materi terkait dengan lingkungan hidup, seperti pentingnya upaya pelestarian lingkungan, tata cara pembuatan lubang biopori, tata cara pengelolaan limbah, dan tata cara pengelolaan sampah.
2	<i>Environmental Skill</i>	Berbagai pelatihan dan praktik seperti pengelolaan sampah, pengelolaan limbah dapur, pembuatan lubang biopori.
3	<i>Environmental Attitudes</i>	Membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, membersihkan sungai, buang air di jamban atau kamar mandi bukan di sungai
4	<i>Environmental Participation</i>	Penghijauan dari lingkungan terkecil yaitu rumah, perawatan lubang biopori dan sumur resapan sebagai penjagaan cadangan air, dan pemanfaatan barang daur ulang seperti plastik.

Terlepas dari hal diatas, berdasarkan studi tentang pelaksanaan program KOTAKU di berbagai daerah, program ini akan berjalan lebih efektif ketika dilakukan melalui

pendekatan kolaboratif. Prinsip tersebut menegaskan peran pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk berkolaborasi mewujudkan tatanan pemukiman sehat bagi masyarakat. Benton (2013: 221), berpendapat bahwa: "... number of positive features that collaboration can produce and are as listed below: offers the opportunity for bottom-up approach to dealing with regional issues rather than a top-down approach". Pendapat tersebut mempertegas bahwa pendekatan kolaboratif sangatlah penting, karena memungkinkan masyarakat memberikan aspirasi serta melakukan analisis terhadap program yang sedang dilakukan.

KESIMPULAN

Dalam pandangan demokrasi modern, konsep demokrasi tidak hanya terkait dengan sistem pembagian dan pemisahan kekuasaan, melainkan juga membahas mengenai mekanisme keterlibatan warga negara dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk didalamnya dalam aspek lingkungan hidup. Banyaknya kerusakan lingkungan yang ada saat ini hanya bisa diatasi jika seluruh elemen bangsa mau berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Program KOTAKU adalah salah satu program yang dapat menjadi wadah dan juga penggerak partisipasi warga negara dalam upaya pelestarian lingkungan yang sekaligus menguatkan *ecological citizenship*.

DAFTAR PUSTAKA

- Benton, J. E., 2013, *Local Government Collaboration: Considerations, Issues, and Prospects*. State and Local Government Review, Volume 45, Halaman 220-223.
- Dobson, A., 2004, *Ecological Citizenship: a disruptive influence?*
<http://www.vedegylet.hu/okopolitika/Dobson%20%20Ecological%20Citizenship.pdf> diakses pada 30 Juni 2018.
- Heru, Wibowo & Budimansyah, Dasim, 2016, *Warga Negara dan Ekologi : Studi Kasus Pengembangan Warga Negara Peduli Lingkungan dalam Komunitas Bandung Berkebun*,
https://www.researchgate.net/publication/305402033_Warga_Negara_dan_Ekologi_Studi_Kasus_Pengembangan_Warga_Negara_Peduli_Lingkungan_Dalam_Komunitas_Bandung_Berkebun diakses pada 30 Juni 2018.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya – Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, 2016, *Petunjuk Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tingkat Kabupaten/Kota*,

http://kotaku.pu.go.id:8081/pustaka/files/170524_materi_rakor_slum_allevation_2017/MATERI%20DUKUNG%20KOTAKU/02.%20Petunjuk%20Pelaksanaan%20KOTAKU%20Tingkat%20Kota.pdf, diakses pada 30 Juni 2018.

Philippe C. Schmitter & Terry Lynn Karl, 1991, *What Democracy Is. . . and Is Not*, Journal of Democracy, Volume 2, Halaman 76-88.

Pitoko, Ridwan A., 2018, *Catat, Kawasan Kumuh Indonesia Lebih dari 38.000 Hektar*, <https://indeks.kompas.com/tag/permukiman-kumuh/asc> diakses pada 30 Juni 2018.

Rusnaini, 2016, *Global Issues of Citizenship and The Development of Civic Education for University Students in Indonesia*, Prosiding ICTTE FKIP UNS.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

World Wide Fund and Nature (WWF) Malaysia, 2008, *Environmental citizenship: Emerging perspectives in Malaysia*, http://awsassets.wwf.org.my/downloads/environmental_citizenship_study_report_170510.pdf, diakses pada 30 Juni 2018.